

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Strategi Partai

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat atau laut. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dalam pengajaran bahasa merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Hornby mengemukakan bahwa strategi adalah kiat merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara mengatur.

Setiap orang, organisasi, perusahaan bahkan pemimpin negara pasti mempunyai berbagai macam strategi untuk mempermudah mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus terdapat koordinasi tim yang baik pula, dengan kualitas tim yang baik maka pelaksanaan strategi yang telah disusun akan lebih efisien dan efektif. Yang nantinya dapat dicapai hasil yang maksimal.

Penulis berpendapat bahwa strategi adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam merumuskan suatu hal agar diperoleh tujuan secara tepat maka perlunya sebuah strategi. Dari sini penulis berasumsi bahwa partai politik memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat dapat memberikan dampak yang sangat signifikan, yaitu

¹ Sunendar Iskandarwassid, "Strategi Pembelajaran Bahasa," 2008.

masyarakat menjadi sadar dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau calon pemimpin yang benar dan tulus sesuai hati nurani mereka.

b. Pengertian Strategi Partai

Menurut Peter Schorder strategi politik yaitu strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik.² Pada dasarnya, strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Jadi, strategi partai sangat penting untuk menghadapi kontestasi politik di waktu yang akan datang.

c. Jenis-Jenis Strategi Partai

Menurut Peter Schorder strategi politik yaitu merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik.³ Untuk dapat menentukan pilihan yang diinginkan, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui pola dasar strategi yang dibutuhkan.

Berikut beberapa jenis-jenis strateginya⁴ :

- 1) Strategi Ofensif yaitu, strategi yang dibutuhkan jika suatu partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau jika seorang eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek yang ingin ia bangun.
- 2) Strategi Defensif yaitu, strategi yang diperlukan jika partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan posisinya atau eksistensinya ingin dipertahankan.
- 3) Strategi Pencitraan yaitu, strategi yang dilakukan melalui media elektronik seperti televisi atau radio

² Afdhal Alif, “Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Memenangkan Calon Muslim Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Manado,” 2019, 1–12.

³ Alif.

⁴ Alif.

dan media sosial. Selain itu juga media cetak juga sering digunakan untuk para calon untuk membangun pencitraan masing-masing calon. Strategi ini tepat digunakan oleh partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan calonnya kepada masyarakat umum guna meningkatkan jumlah pemilihnya.

- 4) Strategi Ketokohan dan Kelembagaan yaitu, strategi yang pada dasarnya merawat ketokohan dan memperkokoh kelembagaan. Artinya ketokohan seseorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam politik.

d. Manfaat Strategi Partai

Strategi partai politik sangat dibutuhkan oleh suatu partai yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Tanpa adanya strategi suatu partai tidak bisa melakukan perubahan jangka panjang. Dengan adanya strategi juga, suatu partai mempunyai gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin diwujudkan dengan segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵ Jadi, manfaat strategi ini harusnya mempunyai dampak yang besar terhadap manuver politik suatu partai. Strategi partai juga bisa untuk memprediksi situasi politik di tahun-tahun berikutnya, dikarenakan strategi partai dapat melakukan perubahan jangka panjang.

e. Kelemahan Partai

Kepartaian menurut Duverger dibagi menjadi tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai. Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu ada disetiap proses pemilu suatu negara. Sistem kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada dalam suatu negara. Sistem kepartaian tergantung pada jenis sistem politik yang ada dalam sebuah negara. Selain itu juga bergantung kepada kemajmukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di Negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik.

⁵ Alif.

Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem di mana di dalam negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik dan tidak ada satupun partai yang memegang mayoritas mutlak. Sistem multi partai dianggap lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik.

Kelemahan multi partai:⁶

- 1) Menimbulkan persaingan tidak sehat.
- 2) Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
- 3) Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat.
- 4) Dan berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lain.

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Di dalam undang- undang nomor 2 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Menurut Miriam Budiarto, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh

⁶ Arman Zuhdi, "Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi" 6, no. 1 (1945): 22–39.

⁷ Robbani Mushab, "The Implementation Of A Political Party Based On The Laf Of A Political Party In Bandar Lampung (Study in Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung)," 2016.

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.⁸

- 1) **Sigmund Neumann**, menjelaskan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.
- 2) **Carl J. Friedrich**, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
- 3) **Robert K. Carr**, Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.
- 4) **R. H. Soltau**, mendefinisikan partai politik adalah sekelompok kurang lebih terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
- 5) **La Palombara dan Anderson**, mendeskripsikan partai politik yaitu setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas).
- 6) Menurut Josep Schumpeter, partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakpastian

⁸ Mushab.

organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

b. Fungsi Partai Politik

1) Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Partai politik dalam hal ini juga berfungsi untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai berperan sebagai penghubung antara yang diperintah dan juga yang memerintah. Partai politik memberikan usulan-usulan atau mengagregasi kebijakan yang mengacu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diwujudkan kepada pemerintah supaya dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini memperlihatkan bahwa partai politik dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan bagi partai sendiri bisa melakukan hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari, terutama jika suatu partai tersebut ingin tetap eksis dalam kancah politik nasional. Oleh karena itu, partai politik sering disebut *broker* (perantara) dan alat pendengar, sedangkan warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik.

Menurut Jack C. Plano mendefinisikan bahwa setiap proses rekrutmen politik adalah sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan kepala daerah,

jabatan presiden dan anggota parlemen. Sedangkan menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen politik merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.

Sistem rekrutmen politik ini penting dikarenakan inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dari ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang akan direkrut.

Dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sitem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon pemimpin.

4) Sebagai sarana pengtaur konflik.

Partai politik juga mampu menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Tujuan dari pembentukan partai politik menurut undang-undang no.2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu : mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan Partai Politik

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuat keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasian berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilih sangat besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu mengelolanya untuk menjadi keputusan. Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.

Partai politik merupakan hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin didalam undang-undang dasar. Pembentukan partai politik didasarkan atas hak-hak masyarakat dan digunakan sebagai sarana politik masyarakat. Akan tetapi, tujuan dari partai politik tetap untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.

Karena konteks tujuan dari partai politik adalah mewujudkan tujuan negara maka pembentukan partai politik didasarkan bersifat nasional. Jika dibentuk berdasarkan dengan kedaerahan maka tujuan bernegara sulit terwujud dan terbentuknya partai politik dalam skala nasional untuk menjaga persatuan bangsa, dibentuk dengan sekelompok orang agar partai politik merupakan perwujudan dari kesamaan kehendak dan cita-cita, bukan cita-cita dan kehendak individu. Sehingga pembentukan partai politik adalah kehendak bersama bukan kehendak individu.

Tujuan dari partai politik yaitu :

- 1) Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik

- 2) Untuk menjadi sarana dalam upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
- 3) Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi, tujuan dan kepentingan yang sama.

3. Pendidikan Politik

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan (Poerwadarminta, 1985:702).⁹ Pendidikan secara umum bisa berlangsung dalam berbagai bentuk kegiatan, aktivitas, dan praktik-praktik baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pendidikan dianggap sebagai suatu proses yang terus menerus dan berkesinambungan di dalam kehidupan. Bisa dikatakan bahwa pendidikan bermakna segala aktivitas pengembangan seseorang di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hidupnya dan berhubungan dengan dimensi-dimensi lain. Yang intinya tujuan pendidikan adalah mengarah pada membentuk manusia terdidik yang secara substansi manusia terdidik yaitu manusia yang diharapkan memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

b. Pengertian Pendidikan Politik

Di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kurang terdidiknya warga negara secara politik, menjadikan masyarakat cenderung pasif. Terlebih lagi, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokrasi yang

⁹ Niara Mulyadi, "Pengertian Pendidikan" (Bandung, 2019).

baik mensyaratkan adanya partisipasi politik aktif dariarganya. Partisipasi politik ini, hanya dapat berjalan dengan baik jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Namun, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat sekarang ini hanya menggunakan metode satu arah saja, yakni masyarakat hanya menerima tanpa ada tanggapan balik dari masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan yang dilakukan kurang efektif. Ketidakefektifan pendidikan yang dilakukan juga karena metode komunikasi yang kurang tepat. Pola komunikasi satu arah yang dilakukan tidak memberi pengaruh terhadap pengetahuan masyarakat, karena dalam hal ini tidak terjadi proses dialog antara komunikator dengan penerima pesan.¹⁰

Selanjutnya pendidikan politik yang dilakukan untuk masyarakat hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, bukan kepada keseluruhan masyarakat yang berada disuatu wilayah, hal ini berbeda sekali dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya, pendidikan politik yang dilakukan sudah menjadi program dari partai politik itu sendiri, yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan baik berupa pelatihan atau pendidikan politik kepada kader. Sehingga tidak ada keseimbangan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan kepada kader partai politik.¹¹

c. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik

Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi rakyat sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011

¹⁰ putri handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik ' Political Law Of Political Education By Political Parties ,'" *JALREV* 1, no. 02 (2019): 144–66.

¹¹ Nurdin.

tentang partai politik.¹² Menurut Rusadi Kartaprawira bentuk pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui:¹³

- 1) Bahan surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- 2) Siaran radio dan televise serta film (audio visual media).
- 3) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal dan informal.

Sedangkan menurut Firmanzah materi Pendidikan politik dibagi berdasarkan sasaran yang dituju.¹⁴ Sasaran Pendidikan politik ada dua kelompok yaitu masyarakat dan kader partai politik itu sendiri. Pertama, materi pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat adalah mengenai posisi, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi negara dan konstelasi politik terkini. Kedua, materi pendidikan politik yang ditujukan kepada kader partai lebih berorientasi pada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk berfikir jauh kedepan.

Sama halnya dengan materi pendidikan politik, metode pendidikan politik juga membedakan antara pemberian pendidikan politik kepada pimpinan dan kader partai dengan masyarakat. Metode pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada kadernya yaitu secara langsung (tatap muka) dan sifatnya doktrial. Sedangkan pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (perantara) yang

¹² Yanti, "Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat."

¹³ Yanti.

¹⁴ Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik ' Political Law Of Political Education By Political Parties .'"

biasanya melalui media masa yang bisa dimanfaatkan partai politik sebagai sarana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁵

d. Tujuan Pendidikan Politik

Pada intinya pendidikan politik bertujuan membentuk masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan demokratis. Adapun tujuan pendidikan politik menurut Kartono (2009: 62) adalah membuat rakyat mampu memahami situasi sosial-politik, berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai.¹⁶ Partai politik bertujuan menumbuhkan dan membentuk kepribadian dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang positif.¹⁷

Pertama, kepribadian politik. Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada individu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian merupakan tujuan pokok dari Pendidikan politik. Karena tanpa adanya pendidikan politik tidak ada kesadaran politik tanpa kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik. Kepribadian politik adalah merupakan respon dinamis dan berkesinambungan, hal ini muncul biasanya dikarenakan adanya rangsangan politik.

Oleh karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan kecenderungan pelaku. Kepribadian politik terbentuk melalui cara-cara sosialisasi atau Pendidikan politik itu sendiri. Kedua, kesadaran politik. Menurut Petter, kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan

¹⁵ Nurdin.

¹⁶ Iyep Candra Hermawan and Universitas Suryakencana, "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia" 10, no. 1 (2020).

¹⁷ Hermawan and Suryakencana.

nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik.¹⁸

Kesadaran politik dapat dicapai melalui beberapa hal : arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dan pemikir politik. Pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik. Melalui dialog-dialog kritis kesadaran politik akan muncul. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kesadaran politik yaitu, jenis kultur politik dimana individu besar darinya, dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, wawasan politik partisipatif menyebabkan orientasi masyarakat terhadap politik bersifat aktif.

Berbagai perubahan budaya yang telah terjadi di masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru yang berdampak terhadap kesadaran politik individu, juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak kesempatan Pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya sehingga membentuk dan menumbuhkan kesadaran politiknya.

Ketiga, partisipasi politik. Menurut Mayron Weiner mendefinisikan partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Menurut Kamal Al-Manufi, partisipasi politik adalah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung organisasi-organisasi mediator.

Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri pemerintah maupun rakyat. Partisipasi ini akan

¹⁸ Hermawan and Suryakencana.

memperluas kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir padanya. Dalam UUD 1945 memberikan jaminan tentang hak asasi manusia. Diantaranya setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan dan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara.

Hal ini juga terdapat dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dasar, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.

Hak untuk berserikat dan berkumpul ini diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Sesuai dengan undang-undang, maka partai politik merupakan perlebagaan dari kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul yang telah dilindungi oleh undang-undang. Berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Dengan wadah tersebut, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik. Partai politik sebagai pilar penyangga demokrasi. Betapa pentingnya peran partai politik, maka sudah seharusnya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan profesional.

Keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak

terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik dipandang komponen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara berkembang ataupun negara maju.

Namun dari fenomena yang terlihat dalam pengembangan kehidupan politik, banyak masyarakat yang belum bahkan tidak mengetahui kedudukan pribadinya dan peranan politiknya. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan objek politik dan terpaksa harus bersedia menjadi objek kepentingan negara di satu sisi dan partai politik di sisi lain.

Berarti pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran berpartisipasi masyarakat terhadap situasi politik. Tanpa adanya pendidikan politik masyarakat mungkin tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang demokratis. Mereka tidak tahu bahwa partisipasi mereka sangat dibutuhkan dalam proses demokrasi.

e. Penyebab Minimnya Pendidikan Politik

Pendidikan politik sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011. Penyelenggaraan pendidikan politik harus bisa meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli mengenai permasalahan politik yang belum terselesaikan. Bentuk pendidikan yang dilakukan oleh partai pada umumnya berupa kegiatan kampanye dan kaderisasi.¹⁹ Kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik biasanya hanya dilakukan ketika menjelang pemilihan umum saja. Kampanye ini biasanya dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan pada anggota masyarakat.²⁰

¹⁹ Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The Role of Political Parties In Conducting Political Education," *JPPUM: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 51–59.

²⁰ Pasaribu.

Ada dua permasalahan yang penting, pertama, bagaimana usaha-usaha yang diberikan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia. Ini merupakan bentuk pendidikan politik dimana selama ini peran tersebut terabaikan. (Koirudin, 2004: 113).²¹

Seharusnya semua elemen di negeri ikut ambil bagian dalam proses pendidikan politik di negeri ini. Tidak hanya pemerintah, partai politik, atau instansi-instansi yang terkait saja, tetapi semua elemen ikut ambil bagian dalam hal ini yaitu pendidikan politik.

4. Peran Partai Dalam Pendidikan Politik

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Partai sebagai struktur penyangga demokrasi harus bisa memainkan peran dalam mensosialisasikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Rusdi Kantraprawira memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.²²

Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada, sebagaimana dinyatakan Suryadi (2018) dalam kondisi ‘rabun politik’ dan sebagian masyarakat pada umumnya masih buta politik, maka untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu adanya Pendidikan politik. Pendidikan politik diatur dalam pasal 11 angka (1) huruf a undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan Pendidikan politik bagi kader dan warga negara secara luas.

²¹ Pasaribu.

²² Nurdin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik ‘ Political Law Of Political Education By Political Parties .’”

Dalam undang-undang ini juga diamanatkan perlunya Pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 13 huruf e undang-undang no. 2 tahun 2011, juga diatur mengenai Pendidikan politik yaitu kewajiban partai politik memberikan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi anggotanya dan masyarakat luas.

Partai politik juga berfungsi untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pada pasal 34 ayat (3b) ditegaskan bahwa Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut :²³

- a. Pendalaman mengenai empat pilar barbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, uud 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan politik seharusnya semakin ditingkatkan supaya terbangun karakter bangsa sebagai watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman Bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, dan keihlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah

²³ Hermawan and Suryakencana, "Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia."

yang sebetulnya menentukan demokrasi. Dalam sistem *representative democracy*, biasanya dipahami bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemnngutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan.²⁴ Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap dominan.

Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar semua elemen masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan politik, sehingga mampu berkontribusi membangun bangsanya bersama dengan pemerintah.

5. Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi lebih dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat luas. Sedangkan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

Melalui sosialisasi politik inilah suatu partai bekerja keras untuk menanamkan ideologi partai politik mereka kepada masyarakat. Proses sosialisasi politik dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal dan nonformal, maupun dengan cara tidak sengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.

Dalam sosialisasi politik terdapat dua cara atau metode penyampaian pesan, yaitu :

a. Melalui Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah suatu proses kegiatan mengajarkan kepada kadercdan masyarakat luas mengenai simbol-simbol, nilai-nilai, norma-norma politik melau media berupa sekolah, instansi pemerintah dan juga partai politik.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 3 (2006): 4.

Partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus partai, kader, dan masyarakat luas.

1) Materi Pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada pengurus partai, kader lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir kedepan.

2) Metode Pendidikan

Metode digunakan untuk menyampaikan materi dapat berupa penyampaian secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, pada pelaksanaannya penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, contohnya dengan menggunakan media massa sebagai alat komunikasinya.

3) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. Diharapkan dengan dilakukannya pendidikan politik akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus partai serta masyarakat.